

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Istilah pengangguran pada dasarnya berasal dari kata “penganggur” yang bermakna tidak melakukan kegiatan apapun. Jika diartikan menurut kata asal maka kata pengangguran berarti seseorang yang tidak melakukan apapun dalam bidang pekerjaan yang seluruh aktivitasnya bisa menghasilkan uang. Hal ini pengangguran merujuk pada kondisi dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja. Secara umum, pengangguran diukur sebagai presentase dari angkatan kerja yang dimana mencakup orang-orang aktif yang sedang mencari pekerjaan.

Menurut Mankiw (2003) dalam (Wahyu Lillah & Shasta Pratomo, n.d.) Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Menurut Arfan Poyoh (2017) dalam (Arfan Poyoh, Gene H.M Kapantau, Juliana R Mandey, n.d.) , Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Menurut Iskandar Putong (2003) dalam (Setiyawati & Hamzah, 2007) penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau

penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak memperoleh pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (*future stars*).

Menurut Sukirno (2006:13) dalam (Hadi Prasaja et al., 2013b) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Kaufan dan Hotchkiss (1999) dalam (Wardiansyah et al., 2016) Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam kurun waktu selama empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa dalam indikator ketenagakerjaan yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase. Ketika banyak orang yang mengalami rendahnya pendapatan atau mengalami

masalah pengangguran, maka dampaknya dapat meluas kepada ekonomi secara keseluruhan. Minimnya suatu pendapatan dapat menyebabkan para penganggur mengurangi belanja konsumen, sehingga berujung pada berkurangnya tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan. Rendahnya pendapatan dapat memiliki dampak negatif pada tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan individu atau keluarga, serta dapat membatasi akses terhadap peluang dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

2.1.1.2 Teori Pengangguran

1. Teori Keynes

Keynes berpendapat bahwa masalah dari pengangguran disebabkan karena rendahnya permintaan agregat. Sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi oleh rendahnya konsumsi. Pendapat dari Keynes bahwa hal ini tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat maka upah turun dan penurunan upah tersebut mengakibatkan kerugian karena menggambarkan daya beli masyarakat pada suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Selain itu, upah cenderung sulit mengalami penurunan sehingga teori Keynes dianggap tidak tepat.

2. Teori Klasik

Teori Klasik menyatakan berlawanan dengan teori Keynes, karena bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme

harga di pasar bebas serta menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (*supply*). Klasik juga berpandangan bahwa pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang sifatnya sementara kemudian dapat diatasi melalui mekanisme pasar (Gilarso. T,2004).

3. Teori Lewis

Lewis berpandangan bahwa tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Teori Lewis menganggap bahwa pada berbagai Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, tetapi sebaliknya yakni menghadapi masalah kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas (Sadono Sukirno, 2006:196).

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Sukirno (2000:8:9) dalam (Nurrahman, n.d.) mengklasifikasikan pengangguran menurut sebab terjadinya pengangguran dibagi menjadi dua jenis pengangguran yaitu :

1. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam menemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran ini terhambat karena proses permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak lancer yang disebabkan oleh tempat dan waktu. Sehingga, disaat pencari pekerjaan belum menemukan

lowongan kerja, baik karena alasan waktu, jarak, maupun informasi yang kurang maka seseorang termasuk ke dalam jenis pengangguran friksional.

2. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah disaat terjadi permasalahan struktur atau permasalahan komposisi perekonomian maka berdampak pada kebutuhan keterampilan dari tenaga kerja. Namun, pencari kerja belum bisa beradaptasi dengan keterampilan yang dibutuhkan tersebut. Dengan demikian, seorang pencari kerja tersebut termasuk ke dalam jenis pengangguran struktural.

Menurut Sukirno (1994) dalam (Nurrahman, n.d.) pengangguran berdasarkan cirinya dibagi menjadi kedalam empat kelompok :

1. Pengangguran Terbuka (*Openemployment*)

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang dikarenakan adanya penambahan lowongan pekerjaan lebih rendah atau sedikit dari pertumbuhan tenaga kerja. Sehingga berakibat pada perekonomian dan semakin banyak jumlah tenaga kerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia.

2. Setengah Menganggur (*Underemployment*)

Pengangguran yang setengah menganggur terjadi jika kurang optimalnya tenaga kerja karena tidak ada lapangan kerja yang tersedia. Diasumsikan bahwa tenaga kerja tersebut hanya bekerja satu hingga dua minggu dalam satu bulan atau hanya empat jam dalam satu hari atau bekerja selama kurang dari 35 jam

selama satu minggu. Pekerjaan yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan dalam setengah menganggur.

3. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi jika tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu. Misalnya, untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya sudah cukup dilakukan oleh tujuh orang, akan tetapi pekerjaan tersebut dilakukan oleh sebelas orang. Sehingga, yang berjumlah empat orang sisanya adalah menganggur.

4. Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat musim tertentu. Pengangguran bermusim terjadi lebih banyak pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim tertentu para petani dan nelayan melakukan pekerjaan serta bisa memperoleh penghasilan. Sedangkan pada musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan, dan pada musim kemarau petani tidak dapat menggarap pekerjaannya. Oleh karena itu, saat petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan maka mereka termasuk kedalam penganggur serta pengangguran tersebut digolongkan kedalam pengangguran bermusim.

2.1.1.4 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Menurut Tan Phey Lien (2022) dalam (Tan Phey Lien et al., 2022) secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya pengangguran semakin meningkat, yaitu :

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Realisasi investasi belum cukup tinggi.
3. Persaingan pasar global.
4. Kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot.
5. Tidak seimbang antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang disediakan.
6. Terbatasnya lowongan pekerjaan sektor formal.
7. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu Negara menyebabkan masyarakatnya tidak mampu menempuh tingkat pendidikan yang tinggi.
8. Rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki angkatan kerja.
9. Keterampilan dan *skill* para pencari pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.

2.1.1.5 Dampak Terjadinya Pengangguran

Menurut Prasaja (2013) dalam (Hadi Prasaja et al., 2013b) terdapat beberapa dampak yang diterima oleh suatu negara akibat dari angka tingkat pengangguran yang semakin tinggi, diantaranya :

1. Aktiivtas perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan.
2. Kemakmuran masyarakat menurun sehingga pendapatan nasional menurun.
3. Angkatan kerja tidak terserap sepenuhnya atau tidak terserap dalam jumlah yang banyak.

4. investasi produktif akan berkurang sehingga kesempatan kerja mengalami penurunan.

2.1.1.6 Cara Mengatasi Pengangguran

1. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan

Untuk mendorong keterampilan maka pemerintah menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Serta dengan pendidikan yang memadai dapat membuat seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualifikasi.

2. Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan cara meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan bersertifikasi. Secara langsung dapat melatih calon tenaga kerja menuju disiplin dan teratur sehingga melahirkan SDM yang terampil dan professional.

3. Mendorong Kewirausahaan

Mengatasi pengangguran dan mendorong kewirausahaan adalah suatu tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang terpadu dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi dukungan keuangan dan peraturan ramah bagi wirausaha baru, serta perkuat sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memastikan bahwa para pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Umi Kalsum (2017) dalam (Kalsum, n.d.) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu Negara khususnya pada bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk ruang lingkup daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain dipengaruhi oleh faktor internal, pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, ada tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut yakni pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha.

Pertumbuhan ekonomi yakni menelaah faktor-faktor tertentu dari pertumbuhan output jangka menengah dan output jangka panjang, faktor-faktor penentu pertumbuhan diantaranya tenaga kerja penuh, teknologi, akumulasi modal yang cepat serta tabungan investasi yang tergantung pada besarnya *income* suatu masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi suatu keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi peningkatan pendapatan karena meningkatnya suatu produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian pada suatu Negara secara berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik pada periode tertentu. Menurut Kuznet Jingham (2012:57) dalam (Febrianti et al., n.d.) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan pada suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada

masyarakat, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan yang diperlukan.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi dan energi memudahkan pergerakan barang dan jasa serta kualitas tenaga kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi pada tingkat global, seperti krisis keuangan internasional, hubungan perdagangan dengan negara lain dan faktor alam seperti perubahan iklim atau bencana alam dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi tertentu serta menghambat pertumbuhan perekonomian pada suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa pada masyarakat meningkat serta terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Sukirno (1994) dalam (Audia et al., 2018) penambahan potensi dalam suatu produksi seringkali lebih besaar dari pertambahan produksi yang sebenarnya sehingga perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya. Dengan demikian, meskipun suatu perekonomian memiliki potensi untuk meningkatkan output produksi dan pendapatan nasional, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama melakukan analisis hasil tentang pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu Negara maupun pada suatu daerah. Ekonomi dikatakan tumbuh jika ada peningkatan dari produksi barang dan jasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dalam periode tertentu. Menurut Todaro Michael.P dan Stephen C.Smith (2008:12) dalam (Noviarita et al., 2021a) semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka menandakan semakin baik kegiatan ekonomi yang diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

2.1.1.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Klasik

Menurut Klasik, berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Kaum klasik berpendapat bahwa bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat otomatis dapat menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi, karena keyakinan tersebut Klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat (Adisasmita, 2013).

2. Teori Adam Smith

Teori Adam Smith, Arsyad (1997) berpendapat bahwa Adam Smith merupakan salah satu tokoh klasik mengenai teori ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek yang saling berkaitan, yakni: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Supaya output mengalami pertumbuhan maka SDA harus dikelola dengan baik oleh tenaga kerja dengan memanfaatkan barang modal.

3. Teori David Ricardo

David Ricardo mengkritik pemikiran dari teori Adam Smith yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak mengakibatkan jumlah tenaga kerja menjadi melimpah. Sehingga dapat menyebabkan menurunnya upah yang diterima, bahkan upah itu hanya bisa digunakan untuk tingkat hidup minimum. Apabila hal tersebut terjadi, maka ekonomi mengalami stagnasi.

2.1.1.8 Jenis-Jenis Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam kurun waktu jangka panjang, tanpa mengorbankan sumber daya alam atau kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya serta berfokus pada efisiensi penggunaan

SDA dan mengintegrasikan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi untuk mencapai suatu Pembangunan yang berkelanjutan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan mencirikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam kurun waktu jangka pendek, tetapi mengakibatkan dampak negatif berjangka Panjang. Sehingga dapat mengeksploitasi SDA yang berlebihan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan menghasilkan tekanan besar pada lingkungan juga ketidakseimbangan ekonomi dan sosial.

2.1.1.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan saling berinteraksi serta berbeda-beda antar negara.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Investasi.
2. Inovasi dan teknologi.
3. Tenaga kerja.
4. Kebijakan ekonomi.
5. Infrastruktur.
6. Kondisi ekonomi global.
7. Distribusi pendapatan.
8. Sumber daya alam dan ketidakpastian iklim.

2.1.2 BI rate

2.1.2.1 Pengertian BI rate

Suku bunga dasar Bank Indonesia atau BI *rate* merupakan suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh Bank Indonesia. Dalam perekonomian suatu negara, nilai mata uang tersebut mempengaruhi nilai suku bunga. Menurut Dahlan Siamat (2001) dalam (Taufiq et al., n.d.) , BI *rate* adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal *stance* kebijakan moneter. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa BI *rate* atau suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi dan karakteristik penting bahwa suku bunga ini diberlakukan selama satu bulan tentang periode berlakunya suku bunga tersebut sebelum memungkinkan adanya suatu perubahan ataupun kebijakan dari Bank Indonesia sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan moneter serta BI *rate* dapat mencerminkan sikap atau kebijakan yang diambil oleh bank sentral terkait dengan tingkat suku bunga untuk mencapai tujuan tertentu.

BI *rate* merupakan standar suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia untuk transaksi perbankan dalam negeri. Menurut Djulius Nurdiansyah (2014) dalam (Horas Djulius, Yudi Nurdiansyah, n.d.) , dari perspektif ini suku bunga menandakan masuk dan keluarnya modal asing dan pada akhirnya dapat mencerminkan nilai tukar. Menurut Astuti (2014) jika suku bunga asing relatif tidak berubah maka suku bunga BI akan naik sehingga menyebabkan investasi Indonesia menjadi meningkat karena Indonesia menawarkan imbal hasil yang lebih menarik

dibandingkan dengan investor asing yang berinvestasi pada penawaran menggunakan dollar AS. Selain BI *rate* pergerakan nilai tukar juga berhubungan dengan jumlah uang beredar. Dimana apabila terjadi peningkatan jumlah uang beredar maka terjadi lemahnya nilai tukar. Jumlah uang beredar merupakan uang yang dipegang masyarakat *money supply* atau penawaran uang. BI *rate* yang stabil dapat menjaga kestabilan jumlah uang beredar. Penelitian dari Mall (2013), mengatakan bahwa suku bunga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah uang beredar.

2.1.2.2 Kebijakan BI *rate*

Kebijakan mengenai BI *rate* ditetapkan dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada November 2021. Dalam kondisi tertentu, BI *rate* dapat disesuaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan-bulan yang lain. operasi moneter dengan BI *rate* dilakukan melalui lelang mingguan dengan mekanisme *variabel rate tender* dan *multiple price allotments*.

Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, pada perkiraan inflasi yang rendah dan Upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengoptimalkan secara berkelanjutan mengenai kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi secara lanjut melalui penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas *stance* kebijakan moneter akomodatif serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi. Menurut Dahlan Siamat (2004), dengan demikian sinyal respon kebijakan

moneter melalui BI *rate* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia diperkuat melalui berbagai macam transaksi keuangan pada pasar uang.

2.1.2.3 Fungsi BI *rate*

Fungsi BI *rate* digunakan sebagai acuan operasi moneter untuk mengarahkan rata-rata tertimbang suku bunga SBI-1 bulan hasil lelang OPT (Operasi Pasar Terbuka) berada di sekitar BI *rate*. Selanjutnya suku bunga SBI-1 bulan tersebut diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), suku bunga deposito, suku bunga jangka waktu yang lebih panjang dan kredit. Bank Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dari perekonomian, umumnya akan menaikkan BI *rate* bila diperkirakan inflasi ke depan sampai melampaui sasaran yang sudah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* jika diperkirakan kedepannya inflasi berada dibawah sasaran yang sudah ditetapkan.

2.1.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1.3.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing yakni perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang melakukan usaha penanaman modal di wilayah Negara

Republik Indonesia. Menurut Jufrida (2016), mengenai Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Undang-Undang tersebut yakni :

1. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
2. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, kemudian mendapat persetujuan pemerintah serta digunakan pembiayaan perusahaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini dan keuntungan yang dipernankan ditransfer, akan tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan cara jalan yang membangun, membeli total perusahaan. Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967, bahwa penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, mengandung arti yakni secara langsung pemilik modal menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut Igamo (2015) dalam (Alghifari Mahdi Igamo et aLl., n.d.), Penanaman Modal Asing atau disebut dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modal dalam jangka kurun waktu yang panjang kepada perusahaan di negara lain. Negara asal

Perusahaan yang menanam modal disebut dengan *host country* sedangkan tempat investasi yang dituju disebut *home country*.

2.1.3.2 Teori Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Zaidun (2018), dalam ilmu hukum investasi terdapat 3 ragam pemikiran dalam menafsirkan kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan atau kebijakan hukum investasi dari kepentingan negara penerima modal atau *home country* yakni :

1. Neo Classical Economic Theory

Teori ini menjelaskan bahwa jika investasi masuk maka akan membawa dampak positif dan menerima dengan terbuka terhadap keberadaan masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap bermanfaat untuk *home country*. Hal ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa kepada penerima modal akan mendorong modal domestik dan dapat digunakan sebagai berbagai usaha.

2. Dependency Theory

Teori ini tidak menerima masuknya investasi asing, dan memandang masuknya investor asing dapat melumpuhkan investasi domestik serta mengambil posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional.

3. The Middel Path Theory

Teori ini berpandangan bahwa masuknya investasi asing selain memiliki banyak manfaat bisa menimbulkan dampak negatif, sehingga negara harus berperan untuk mengurangi dampak negative melalui berbagai kebijakan hukum yang

ditetapkan melalui *screening* dalam perizinan dan upaya yang serius dalam penegakan hukum.

2.1.3.3 Manfaat Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Arsyad (2010) dalam (Ardya & Yudhistira, 2023) , manfaat PMA bagi negara berkembang, yaitu :

1. Sumber tabungan.
2. Proses alih teknologi.
3. Menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mendapatkan keterampilan baru bagi negara berkecambah.

2.1.4 Angkatan Kerja

2.1.4.1 Pengertian Angkatan Kerja

Menurut Eliza Y (2015) angkatan kerja (labor force) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan (Sumarsono, 2004).

Angkatan kerja adalah tiap individu yang telah memasuki usia kerja sesuai dengan Undang-Undang perburuhan yang di berlakukan pada suatu Negara. Menurut Latumaerissa (2015) dalam (Larasati & Sulasmiyati, 2018), angkatan kerja terbagi tiga, yakni: penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk yang mempunyai

pekerjaan namun sementara, dan penduduk yang menganggur atau pengangguran. Untuk mengukur persentase populasi orang dewasa yang berpartisipasi dalam angkatan kerja maka dapat diukur dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Menurut Mankiw (2008), TPAK atau *Labor Force Participation Rate* adalah mengukur persentase jumlah populasi orang dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Rumus dalam mencari TPAK, yakni :

$$TPAK = \frac{\text{ANGKATAN KERJA}}{\text{JUMLAH PENDUDUK DEWASA}} \times 100$$

Menurut Mulyadi (2003), TPAK adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2016), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK merupakan persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Masyarakat Indonesia sejatinya memiliki hak atas mendapatkan suatu pekerjaan yang layak serta sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 ayat 1 bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh suatu pekerjaan”. Akan tetapi, penegakan Undang-Undang ini diyakini belum cukup karena adanya stigma gender dari masyarakat, dimana masih terjadinya diskriminasi pada gender.

2.1.4.2 Teori Angkatan Kerja

1. Teori Klasik Adam Smith (1729-1790)

Teori Klasik Adam Smith mengutarakan bahwa penempatan sumber daya manusia yang efektif merupakan awal dari pertumbuhan ekonomi,

penempatan sumber daya manusia menjadi syarat tumbuhnya perekonomian sehingga dapat menciptakan akumulasi modal.

2. Teori John Mayner Keynes (1883-1946)

Teori John Mayner Keynes bertolak belakang dengan teori Klasik yang diungkapkan Adam Smith realita nya pekerja mempunyai serikat kerja yang selalu berupaya untuk memperjuangkan upah yang diterimanya. Kemungkinan kecil mengenai penurunan upah, karena jika upah menurun maka tingkat pendapatan turun. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Angkatan Kerja

1. Bekerja Penuh

Angkatan kerja yang bekerja penuh memanfaatkan jam kerja nya secara penuh hingga 8-10 jam dalam waktu 1 hari. Seorang tenaga kerja yang dikatakan bekerja penuh apabila melakukan pekerjaannya sebagai rutinitas sehari-hari dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan (*income*) serta waktu minimal untuk bekerja adalah dua hari dalam seminggu.

2. Setengah Menganggur

Tenaga kerja yang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja setengah menganggur yakni pekerja yang tidak memanfaatkan waktu kerja nya secara maksimal, jika ditinjau dari jam kerja yang digunakan, produktifitas kerja serta *income*.

Angkatan kerja setengah menganggur digolongkan sesuai dengan jam kerja, produktifitas dan penghasilan dalam 2 golongan yaitu:

- a. Setengah menganggur kentara, yaitu angkatan kerja yang mempunyai jam kerja kurang lebih 35jam dalam waktu seminggu.
- b. Setengah menganggur tidak kentara, yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja secara produktif serta memiliki *income* rendah.

2.1.5.4 Pengelompokan Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) terbagi 2 kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Golongan yang termasuk kategori angkatan kerja atau *labour force* yakni:

1. Kelompok yang bekerja.
2. Kelompok yang pengangguran atau sedang mencari pekerjaan.

Menurut Mahroji, Dwi dan Lin (2019), kelompok yang tidak termasuk angkatan kerja (*labour force*), yakni:

1. Kelompok yang bersekolah, mereka yang kegiatan utamanya hanya bersekolah.
2. Kelompok yang mengurus rumah tangga, mereka yang aktifitas utamanya mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
3. Kelompok lainnya atau penerima pendapatan (*income*) dari uang pensiunan serta mereka penerima pendapatan yang hidupnya menggantungkan diri kepada orang lain (Malahayati, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	No, Volume, Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Khotimah Khusnul, 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015.	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan kerja Variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran	Variabel bebas menggunakan tingkat Pendidikan dan upah minimum	Tingkat Pendidikan, Angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh signifikan Tahun 2005-2015	<i>Jurnal Pendidikan dan Ekonomi</i> , Volume 7, Nomor 6, Tahun 2018
2.	Wardiansyah M, <i>et all.</i> 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera)	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel terikat menggunakan Tingkat Pengangguran	Variabel bebas menggunakan Tingkat Upah	Perkembangan tingkat pengangguran tertinggi diperoleh Provinsi Bengkulu, sedangkan perkembangan tingkat pengangguran terendah di Provinsi Sumatera Selatan.	ISSN: 2303-1220
3.	Tan Phey Lien (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi di Indonesia.	Variabel terikat menggunakan pengangguran	Variabel bebas menggunakan Analisa kebijakan Pemerintah	Inflasi tersebut terjadi dengan persentase paling tinggi disebabkan oleh kelompok transportasi	Volume 1 Nomor 3 Tahun 2022. ISSN 2829-2502

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Nirmala Angela Maria Lumi, <i>et all.</i> 2021. Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran di kota-kota Provinsi Sulawesi Utara.	Variabel bebas menggunakan Angkatan Kerja Variabel terikat menggunakan Tingkat Pengangguran	Variabel bebas menggunakan Indeks Pembangunan Manusia	IPM berpengaruh negatif dan signifikan dan secara bersama-sama jumlah Angkatan kerja dan IPM berpengaruh signifikan	ISSN 2303-1174. <i>Jurnal EMBA</i> Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal. 162 - 172
5.	Fitria Santri Andriani dan Riani Westi. 2018. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Periode 2000-2020.	Variabel bebas menggunakan LPE Variabel terikat menggunakan Tingkat Pengangguran	Variabel bebas menggunakan IPM dan Upah Minimum	LPE berpengaruh signifikan, sedangkan Upah Minimum berpengaruh negatif, dan IPM berpengaruh positif.	Vol. 2 No. 1 (2022): <i>Bandung Conference Series: Economics Studies</i>
6.	Sahlan Ahmad Hadi, Riani Westi dan Haryatiningsih Ria. 2022. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (LPM)	Variabel bebas menggunakan LPE Variabel bebas menggunakan Tingkat Pengangguran	Variabel bebas menggunakan IPM	Upah, LPE dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran,	Vol. 2 No. 2 (2022): <i>Bandung Conference Series: Economics Studies</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Baihawafi Muhammad dan Frida Asnita Sebayang. 2023. Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka.	Variabel bebas menggunakan LPE Variabel terikat menggunakan Pengangguran	Variabel bebas menggunakan Upah Minimum dan IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, IPM dan LPE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat.	Volume 3, NO. 1, Juli 2023. ISSN 2798-639X
8.	Bella Yunita David, Daisy S.M Engka, 2019. Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Sulawesi Utara.	Variabel bebas menggunakan Angkatan kerja Variabel terikat menggunakan pengangguran	Variabel bebas menggunakan Jumlah Penduduk	Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan	ISSN 2303-1174. <i>Jurnal EMBA</i> Vol.7 No.8 Juli 2019
9.	Pasuria Satrio dan Triwahyuningtias Nunuk. 2022. Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB	Variabel bebas menggunakan Angkatan kerja	Variabel bebas menggunakan upah minimum dan PDB	Angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan PDB berpengaruh simultan	SIBATIK JOURNAL Vol.1 NO.6 (2022). ISSN 2809-8544
10.	Hemanto Bambang, Karno dan Subiyantoro Heru. 2021. Pengaruh PMA, Koperasi, dan UMKM pada pertumbuhan ekonomi dan	Variabel bebas menggunakan Penanaman Modal Asing Variabel terikat menggunakan Pengangguran	Variabel bebas menggunakan Koperasi dan UMKM Variabel Terikat Menggunakan LPE	Pertumbuhan ekonomi dikatakan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.	Volume 23 Nomor 3, Oktober 2021.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	implikasinya pada Pengangguran se-Jabodetabek.				
11.	Astrid E dan Soekapdjo S. 2020. Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, IPM,PMA dan PMDN terhadap tingkat Pengangguran di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan PMA Variabel terikat menggunakan Pengangguran	Variabel bebas menggunakan inflasi, IPM, PMDN,	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan, namun IPM dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan. Jumlah penduduk dan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.	Vol 22, No 2 (2020). ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X
12.	Marliana Lina. 2021. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel terikat menggunakan Pengangguran.	Variabel bebas menggunakan Upah Minimum dan IPM	Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan.	<i>Journal of Economics and Business</i> , Vol.6(No1), Maret 2022, 87-91. ISSN 2597-8829
13.	Yuniarti Qorina dan Imaningsih Niniek. 2022. Pengaruh Pertumbuhan	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel terikat	Variabel bebas menggunakan Tingkat Kemiskinan, dan Indeks	LPE dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan dan positif signifikan,	<i>Journal of Economics and Business</i> , Vol.6(No.1) 2022.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo.	menggunakan pengangguran	Pembangunan Manusia	sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap TPT.	ISSN 2597-8829
14.	Mochamad Rohim. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di kab/kota Jawa Barat tahun 2008–2014.	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel terikat menggunakan TPT.	Variabel bebas menggunakan Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan Upah minimum dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan.	<i>Jurnal Registratie</i> , Vol.2 (No 1). pp. 1-8. ISSN 2715-52198
15.	Hadi Mukti Prasaja. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011.	Variabel terikat menggunakan Pengangguran	Variabel bebas menggunakan PMA	Investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan, Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan.	EDAJ Vol2 (No.3) (2013) ISSN 2252-6889

2.3 Kerangka Pemikiran

2.1.5 Hubungan Antara Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka di Indonesia

Baihawafi Muhammad dan Frida Asnita Sebayang (2023) bahwa dalam jurnalnya menyimpulkan mengenai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yakni mempunyai hubungan negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Oleh karena itu, terdapat hubungan yang negatif antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Apabila LPE tinggi maka menyebabkan menurunnya angka pengangguran. Ketika LPE meningkat, maka yang menggerakkan roda perekonomian otomatis meningkat sehingga terjadi peningkatan jumlah output yang dihasilkan. Dalam hal ini, peran pekerja semakin dibutuhkan, otomatis jumlahnya bertambah dan jumlah pengangguran dapat menurun. Menurut Prawira (2018), artinya bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin rendah dan sebaliknya.

2.1.6 Hubungan Antara Bi Rate Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di

Indonesia

Hendry Cahyono, S.E., M.E (2015) bahwa dalam jurnalnya menyimpulkan mengenai BI *rate* yakni mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Oleh karena itu, terdapat hubungan yang negatif antara *BI rate* dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Apabila *BI rate* mengalami penurunan maka dapat meningkatkan investasi, sehingga peningkatan investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.

2.1.7 Hubungan Antara Penanaman Modal Asing Dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka di Indonesia

Elvana Astrid dan Soeharjoto Soekapdjo (2020) bahwa dalam jurnalnya menyimpulkan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan di Indonesia dengan ketentuan kebijakan pemerintah, banyak yang berorientasi padat karya, yang dimana menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang ada serta berdampak pada penurunan angka tingkat pengangguran.

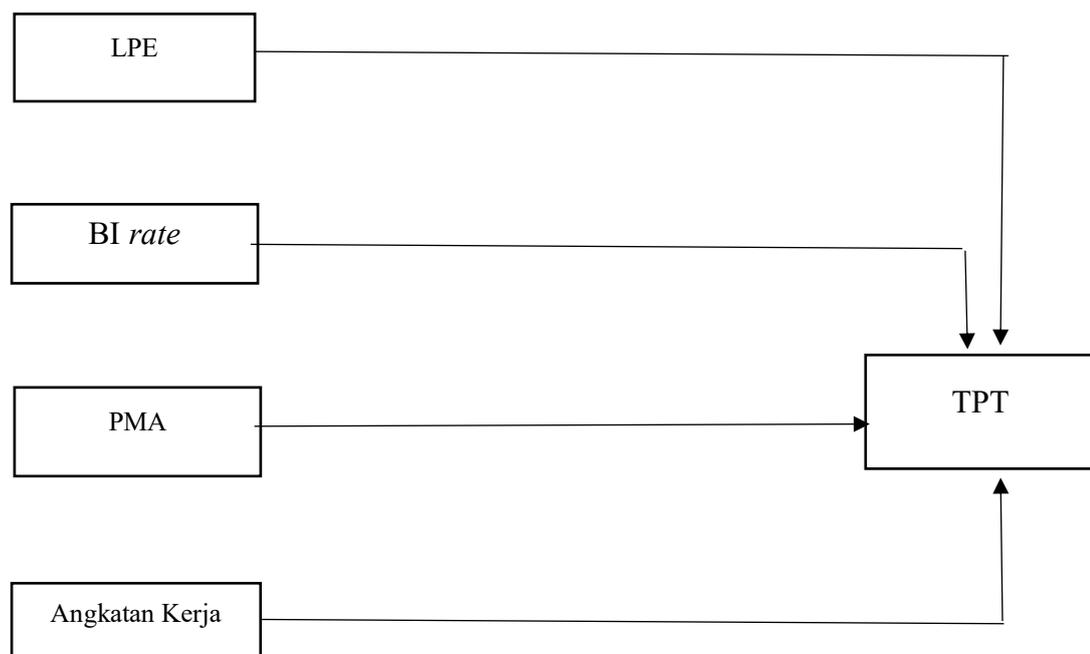
Oleh karena itu, terdapat hubungan yang negatif antara Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia, maka secara langsung akan terjadi peningkatan dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Artinya, perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja lokal untuk menjalankan operasional mereka. Sebagai akibatnya, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja, sehingga jumlah angka tingkat pengangguran dapat berkurang.

2.1.8 Hubungan Antara Angkatan Kerja Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Khotimah Khusnul (2018) bahwa dalam jurnalnya menyimpulkan mengenai angkatan kerja yakni berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY, yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan TPAK maka akan mengurangi tingkat pengangguran.

Oleh karena itu, terdapat hubungan yang negatif antara angkatan kerja dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya peningkatan angkatan kerja maka tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya.

Berikut kerangka pemikiran penulis yang berguna untuk memperjelas arah pemikiran penulis dalam menganalisis data:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif, sedangkan BI *rate* dan Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2005-2022.
2. Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi, BI *rate*, Penanaman Modal Asing, dan Angkatan Kerja secara bersama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2005-2022.